

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keberlanjutan lingkungan dan sosial telah menjadi perhatian global dalam dunia bisnis modern seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, krisis sumber daya alam, serta tekanan terhadap praktik industri yang tidak ramah lingkungan (Auranisha et al., 2025; Gajdzik et al., 2021). Aktivitas industri berskala besar berkontribusi terhadap peningkatan emisi, limbah, dan degradasi lingkungan, sehingga memunculkan tekanan yang semakin kuat dari pemerintah, investor, dan masyarakat agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada tanggung jawab lingkungan dan sosial (Widoretno et al., 2025). Perubahan orientasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak lagi dinilai semata-mata dari laba, tetapi juga dari bagaimana perusahaan mengelola dampak non-keuangan terhadap lingkungan dan masyarakat secara berkelanjutan.

Meningkatnya perhatian para pemangku kepentingan terhadap dampak lingkungan dan sosial, perusahaan mendorong perubahan dalam praktik dan strategi bisnis. Investor, regulator, konsumen, dan masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, serta komitmen keberlanjutan perusahaan dalam jangka Panjang (Wu et al., 2025). Dalam perspektif *stakeholder theory*, perusahaan dipandang perlu menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan legitimasi dan dukungan jangka panjang. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk

mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional bisnisnya secara lebih sistematis (Freeman, 1984). Sebagai respons atas tuntutan tersebut, perusahaan semakin didorong untuk menerapkan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

ESG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan, tetapi juga sebagai pendekatan manajerial dalam mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi perusahaan (Auranisha et al.; Wu et al., 2025). Melalui penerapan ESG, perusahaan terdorong untuk mengidentifikasi risiko keberlanjutan jangka panjang, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Integrasi aspek keberlanjutan tersebut menuntut perusahaan untuk menyesuaikan proses operasional dan strategi bisnis agar lebih efisien dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Penyesuaian tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk kebijakan atau pengungkapan, tetapi juga melalui perubahan nyata dalam proses produksi dan pengembangan produk. Salah satu bentuk transformasi strategis tersebut adalah pengembangan *green innovation*, yaitu inovasi produk dan proses yang bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung praktik produksi berkelanjutan (Auranisha et al., 2025).

Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kinerja ESG yang lebih baik berkaitan dengan peningkatan *green innovation* perusahaan.

ESG mendorong kesadaran lingkungan manajerial, memperkuat legitimasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, serta memperluas akses terhadap sumber daya yang mendukung inovasi ramah lingkungan (Tan & Zhu, 2022; Wu et al., 2025). Perusahaan dengan praktik ESG yang lebih kuat cenderung lebih aktif melakukan efisiensi energi, pengurangan emisi, serta pengembangan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ESG tidak hanya berperan sebagai indikator tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebagai faktor pendorong penting bagi aktivitas *green innovation* perusahaan.

Namun demikian, hubungan antara ESG dan *green innovation* tidak selalu berjalan optimal dalam praktiknya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi *green innovation* juga menghadapi berbagai hambatan, seperti kebutuhan investasi awal yang tinggi, ketidakpastian hasil inovasi, serta tekanan biaya jangka pendek yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan (Xu, 2025). Pada beberapa perusahaan di Indonesia, *green innovation* tidak selalu langsung memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan ketika biaya implementasi belum diimbangi oleh manfaat efisiensi jangka panjang (Yana Ulfah, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen ESG tidak selalu secara otomatis diterjemahkan ke dalam praktik *green innovation* yang nyata. Masih terdapat perusahaan yang menjalankan ESG pada tataran pelaporan, namun belum sepenuhnya mengimplementasikannya dalam inovasi proses dan produk yang berorientasi lingkungan. Oleh karena itu, hubungan antara kinerja

ESG dan *green innovation* masih perlu diuji lebih lanjut secara empiris, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Sektor manufaktur menjadi konteks yang sangat relevan dalam penelitian ini karena merupakan salah satu sektor dengan tingkat konsumsi energi dan potensi pencemaran lingkungan yang tinggi. Aktivitas produksi pada perusahaan manufaktur membutuhkan energi dalam jumlah besar dan menghasilkan emisi serta limbah produksi dalam jumlah besar juga. Dalam praktiknya, tidak seluruh perusahaan mampu mengelola limbah produksinya secara optimal, sehingga dalam beberapa kasus limbah industri dibuang tanpa pengolahan memadai dan menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap tekanan lingkungan yang terjadi saat ini.

Temuan empiris menunjukkan bahwa sektor manufaktur termasuk sektor dengan konsumsi energi terbesar dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan data Badan Energi Internasional yang dikutip dalam penelitian Qureshi et al. (2020), sekitar 36% emisi karbon dioksida (CO₂) global berasal dari aktivitas sektor manufaktur. Peningkatan aktivitas industri yang tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan juga mempercepat pemanasan global dan degradasi kualitas lingkungan. Proses produksi industri tidak hanya berkontribusi terhadap pencemaran udara, tetapi juga pencemaran air pada tingkat yang berbahaya (Agustia et al., 2019). Besarnya dampak lingkungan dari sektor manufaktur menuntut perusahaan tidak hanya berfokus pada kinerja

finansial, tetapi juga pada pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, sektor manufaktur menjadi konteks yang tepat untuk menguji hubungan antara kinerja ESG, *green innovation*, dan peran regulasi pemerintah.

Besarnya tekanan lingkungan pada sektor manufaktur menunjukkan bahwa perusahaan perlu menyesuaikan praktik operasionalnya agar lebih berkelanjutan. Respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan ini tidak hanya ditentukan oleh komitmen dan kapasitas internal, tetapi juga oleh dorongan dan tekanan dari pihak eksternal. Penelitian terdahulu menekankan bahwa regulasi pemerintah sebagai faktor eksternal berperan penting dalam mendorong praktik keberlanjutan perusahaan (Wu et al., 2025). Dalam perspektif *institutional theory*, regulasi pemerintah merupakan bentuk tekanan koersif yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan agar menyesuaikan praktik operasionalnya dengan standar lingkungan yang ditetapkan (DiMaggio & Powell, 1983). Di Indonesia, salah satu instrumen regulasi lingkungan yang relevan adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PROPER menilai kinerja lingkungan perusahaan melalui sistem peringkat dan berfungsi sebagai mekanisme evaluatif sekaligus reputasional yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan praktik keberlanjutan.

Secara konseptual, keberadaan regulasi pemerintah berpotensi memperkuat dorongan perusahaan dalam menerjemahkan komitmen ESG ke dalam praktik *green innovation*. Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa pengaruh ESG terhadap *green innovation* menjadi lebih kuat pada lingkungan dengan tekanan regulasi yang tinggi (Wu et al., 2025). Namun, di Indonesia penelitian yang secara khusus menguji peran regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kinerja ESG dan *green innovation* pada perusahaan manufaktur masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kinerja ESG terhadap *green innovation* pada perusahaan manufaktur di Indonesia, serta menguji peran regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai ESG dan *green innovation* pada konteks negara berkembang, khususnya Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kinerja ESG terhadap *Green Innovation* pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dengan Regulasi Pemerintah sebagai Variabel Moderasi.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kinerja ESG berpengaruh positif terhadap *green Innovation* pada perusahaan manufaktur di Indonesia?

2. Apakah regulasi pemerintah (PROPER) memoderasi pengaruh kinerja ESG terhadap *green innovation*

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif kinerja ESG terhadap *green innovation* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.
2. Peran regulasi pemerintah (PROPER) sebagai variabel moderator pada hubungan kinerja ESG dengan *green innovation*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi keuangan dan keberlanjutan dengan menyajikan bukti empiris mengenai dampak kinerja ESG terhadap *green innovation* di Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya pemahaman mengenai *stakeholder theory*, dan *institutional theory* melalui analisis peran regulasi pemerintah sebagai variabel moderasi, yang membantu menjelaskan bagaimana dorongan dari pemangku kepentingan dan tekanan regulatif memengaruhi respons perusahaan dalam menerapkan praktik ESG dan mendorong aktivitas *green innovation*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan penguatan konseptual mengenai peran faktor internal dan eksternal dalam strategi keberlanjutan perusahaan.